

**TINJAUAN HUKUM DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH  
UMUR (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di  
Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MUSYAHWIR TAHIR**

NIM. 10500113133

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musyahir Tahir  
Nim : 10500113133  
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 29 Mei 1995  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum  
Alamat : Perumahan Hertasning Madani Blok K NO. 24  
Judul : TINJAUAN HUKUM DISPENSASI PERNIKAHAN  
ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara  
Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama  
Sungguminasa Kabupaten Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 7 Agustus 2017

Penyusun,



MUSYAHWIR TAHIR  
NIM: 1050011313

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *"Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)"*, yang disusun oleh saudara Musyahwir Tahir, NIM: 10500113133, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 7 Dzul-Qa'idah 1438 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 31 Juli 2017 M  
7 Dzul-Qa'idah 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hamsir, S.H, M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Rahman Syamsuddin, S.H, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Pembimbing II	: St. Nurjannah, SH., MH	(.....)



Diketahui Oleh :  
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag  
NIP.19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala nikmat, karunia dan limpahkan rahmat-NYA yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul ***“TINJAUAN HUKUM DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)”***. Yang menjadi suatu persayaratan untuk menyelesaikan pendidikan tingkat strata satu (S1) Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Shalawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad saw, selaku Nabi yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang menderang seperti yang manusia rasakan saat sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan banyak di hadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian, namun hambatan dan permasalahan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak.

Dalam mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu patut diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan Kepada kedua orang tua, Ayanda **H.Muh Tahir S.Sos.** dan Ibunda **Alm Hj.Raja Kebo** tercinta serta Ibu **Nirmayani S.Ag.,M.Ag** selaku pendamping dari ayahanda yang dengan penuh kasih



sayang, pengertian dan iringan doanya dan telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga menjadi manusia yang lebih dewasa. Dan ucapan terima kasih kepada Segenap keluarga Besar yang selama ini memberikan support dan nasehat yang tiada hentinya.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag, Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Abdul Halim Talli, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Dr. Hamsir, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Ibunda Istiqamah, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi jurusan.
5. Bapak Dr. M.Thahir Maloko., M.Hi, selaku Pembimbing I dan Ibu St.Nurjannah,SH., MH, .Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hamsir SH., M.Hum, selaku Penguji I dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH, selaku Penguji II yang selama ini banyak memberikan Kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu dosen dan seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
8. Saudara-saudari Seperjuanganku tercinta ilmu hukum Angkatan 2013, yang selalu memberikan motivasi dan perhatian selama penulisan skripsi ini.
9. Saudara seperjuangan di kelas ilmu hukum 7-8, ilmu hukum C, konsentrasi perdata A yang selama ini mensupport dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 55 yang turut serta mendoakan penulis.
11. Terima kasih kepada Andi Rena Afriyani Pertiwi yang selalu mendorong dan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini .
12. Sahabat-sahabat terbaik saya yang mendoakan dan memotivasi saya, sahabat-sahabat saya di TK Mesjid Agung Bulukumba, SDN 24 Salemba Bulukumba, POMPEES Tarbiyah Takalar, POMPEES Babul Khaer Bulukumba, SMA Negeri 1 Bulukumba.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

*Wassalam*

Makassar, 7 Agustus 2017

Penulis

**MUSYAHWIR TAHIR**



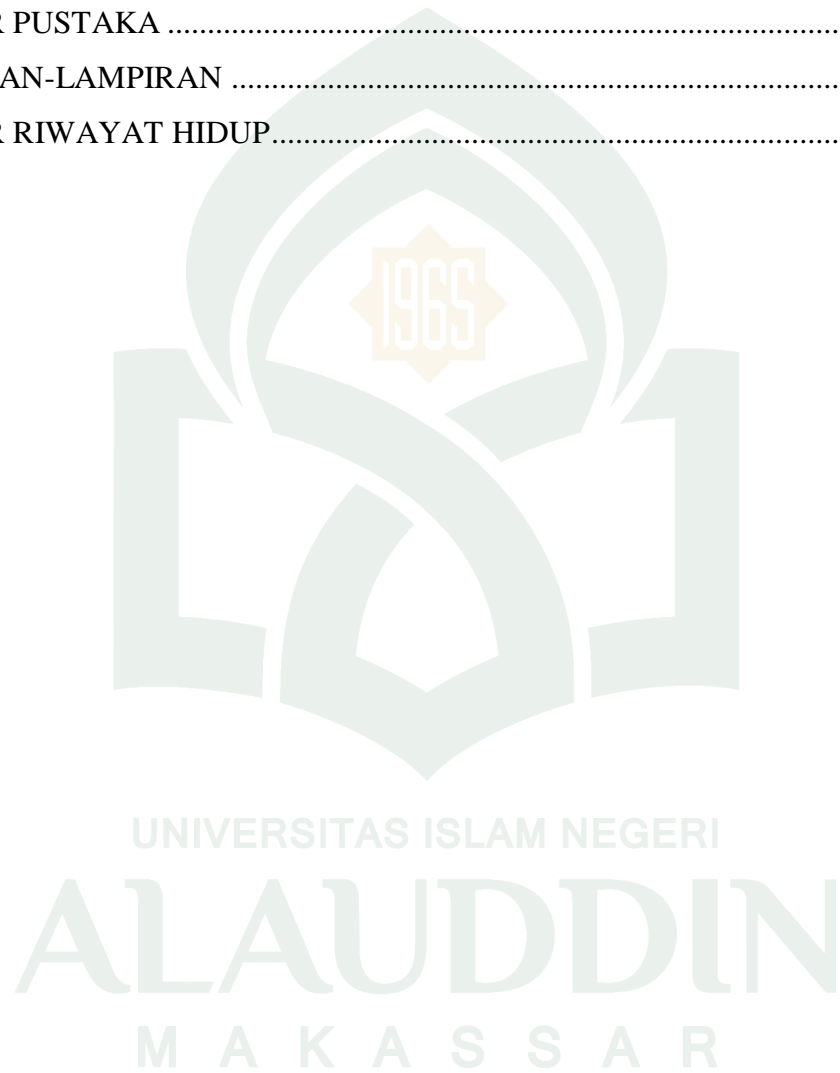
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1-6
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	7-27
A. Pengertian Perkawinan dan Dispensasi.....	7
B. Syarat Sahnya Perkawinan.....	10
C. Tujuan Pernikahan .....	15
D. Hukum Pernikahan.....	18
E. Prosedur Pernikahan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	28-31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Instrument Penelitian .....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH.....	32-60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur.....	34
C. Pertimbangan Hakim Penetapan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur .....	46



D. Analisis Penulis.....	58
BAB V PENUTUP .....	61-62
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



## ABSTRAK

**Nama : Musyahwir Tahir**  
**NIM : 10500113133**  
**Judul : Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)**

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah untuk anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaen Gowa, 2) mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur padaa penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan metode *library resereach* yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan metode *Field Research* yaitu melalui pengamatan lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data. Selanjutnya, teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan, yaitu : secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Lalu diajukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa ada 2 yaitu faktor internal berarti yang terdapat pada diri pribadi sianak yang bersangkutan dan faktor eksternal yaitu bersumber dari orang tua, orang sekitar atau lingkungan. Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur pada penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah adanya bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon baik bukti P.1 maupun P.2. Selain itu, hubungan yang sudah terjalin sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar syariat islam dan perundang-undangan. Tidak adanya halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab ataupun halangan perkawinan lainnya dan kesiapan keduanya baik untuk membina rumah tangga menjadi bahan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Perkara dispensasi itu adalah perkara ringan karena yang mengajukan cuma 1 (satu) pihak artinya pihak pengadilan dalam hal ini majelis, cuma memeriksa apakah yang bersangkutan sudah mampu untuk menikah atau tidak. Karena yang namanya pernikahan sudah memunculkan hak dan kewajiban apakah yang bersangkutan ini sudah mampu melaksanakan kewajibannya pasca menikah, kalau sudah diperkirakan tidak ada lagi yang menghalangi atau suatu yang mengakibatkan mereka tidak mampu menyalankan pernikahan kecuali umur termasuk maka majelis mengabulkan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. *Latar Belakang Masalah***

Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam suku dan ras sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat 3 Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum ”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt. Dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt. telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti menikah dengan saudara sepersusuan. Perkawinan menjadi peristiwa yang didamba-damba semua orang karena dengan perkawinan seseorang dapat mendapatkan keturunan yang sah, baik dalam pandangan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>1</sup>A Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana & ICCE uin Jakarta, 2012), hal.121.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Melihat begitu pentingnya sebuah ikatan demi eksistensi kehidupan manusia, maka perlu ada pemikiran yang matang sebelum menjalin ikatan sebuah pernikahan. Salah satu yang sangat perlu dipikirkan adalah usia. Karena dengan usia yang dewasa atau matang nantinya rumah tangga akan terlaksana dengan baik.

Perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terkait seumur hidup dengan pasangannya. Maka dari itu perkawinan sangat membutuhkan persiapan yang matang, yaitu ke matangan fisik dan mental. Pada dasarnya kematangan jiwa yang sangat perlu dalam memasuki gerbang rumah tangga. Perlu diketahui bahwa perkawinan pada usia muda memiliki dampak negatif dimana lebih dari 50 persen pernikahan anak tidak berhasil, dan akhirnya bercerai,<sup>3</sup> karena pada usia muda seseorang belum siap fisik maupun mental.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah sama-sama dewasa akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga, dengan adanya kedewasaan dari kedua belah pihak baik secara fisik maupun mental, akan membawa rumah tangga tentram dan damai. Hal tersebut dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa diakhiri dengan perceraian. Yang tidak kalah penting adalah mental yang matang merupakan kekuatan yang besar dalam memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga. Kesiapan dan kematangan fisik dan mental merupakan salah satu bekal dalam berumah tangga guna untuk menciptakan kebahagiaan yang kekal dan sejahtera.

---

<sup>2</sup>Tim Permata Pres, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, kewarganegaraan* (Permata Pres, 2015), hal.2.

<sup>3</sup>Petti Lubis, Lutfi Dwi Puji Astuti, 2010, *Artikel Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur* ([www.life.viva.co.id](http://www.life.viva.co.id)) di akses 10 juni 2016, 00:20 WITA.



Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan dalam agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan di asumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana Firman Allah swt Dalam QS al Nuur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nuur : 32)<sup>4</sup>

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak yakni” yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>5</sup> Namun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu di jelaskan dalam pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.<sup>6</sup> Walaupun sudah diatur dengan sedemikian rupa, kemungkinan terjadinya selalu terjadi. Oleh sebab itu di tambahkan dengan ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 494.

<sup>5</sup>Hakam Abbas, 2014, *Artiel Batas Umur Perkawinan Dalam Hukum Islam* ([www.hakamabbas.blogspot.co.id](http://www.hakamabbas.blogspot.co.id)) di akses 10 juni 2016, 05:35 WITA.

<sup>6</sup>Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.290.

Pengadilan atau Pejabat lain yang oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun wanita".<sup>7</sup>

Walaupun Undang-Undang telah mengatur pembatasan usia menikah, pada kenyataannya masih ada yang menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur bisa saja dilakukan namun harus mentaati ketentuan sesuai yang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), Yaitu Ketika ingin mendaftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) harus melampirkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Agar pernikahan itu dapat sah menurut Agama dan Negara. Jika perkawinan di bawah umur tidak melampirkan dispensasi nikah maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatat, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Pasal 8 Bab IV No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon istri belum mencapai 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Pasal tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa hampir tidak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun.<sup>8</sup>

Melihat karna pentingnya dispensasi pernikahan di bawah umur untuk pencatatan pernikahan dan sah menurut Negara, maka penulis bertujuan mengulas lebih jauh mengenai dispensi nikah di bawah umur, mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: **TINJAUAN HUKUM DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR (Analisis Penetapan Perkara**

---

<sup>7</sup>Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, hal.290.

<sup>8</sup>Kartiman Alga, 2012, *Artiel Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang* ([www.kuarancah.blogspot.co.id](http://www.kuarancah.blogspot.co.id)) di akses 10 juni 2016, 15:59 WITA.

**Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)**

**B. Rumusan Masalah**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan maka diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita”. Bertitik tolak dari masalah di atas maka penulis menemukan beberapa masalah antara lain:

1. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur pada penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur pada penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa).

#### **D. *Kegunaan Penelitian***

##### **1. Kegunaan teoritis**

Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan atau menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang pemberian dispensasi pernikahan anak di bawah umur.

##### **2. Kegunaan praktis**

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai pemberian dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur.
- c. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui proses mendapatkan sebuah penetapan hukum dari Pengadilan Agama perihal pemberian dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Perkawinan dan Dispensasi

##### 1. Pengertian Pernikahan

###### a. Menurut Agama

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).<sup>1</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>2</sup>

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>3</sup> Sebagaimana yang didefinisikan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Ansary:

النَّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاهَةَ وَطَيِّئَ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya:

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.<sup>4</sup>

Kemudian Zakiah mendefinisikan bahwa nikah ialah akad mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau semakna dengan keduanya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal.35.

<sup>2</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University Pres, 2012), h. 9.

<sup>3</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, hal.9-10.

<sup>4</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, hal.10.

<sup>5</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, hal.10.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan melalui akad sudah memberikan status kepemilikan kedua belah pihak yakni suami dan istri, dimana suami berhak memperoleh kenikmatan biologis dan memiliki hak penggunaan dan pemakaian terhadap istri.

#### **b. Menurut Hukum Positif**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Pertimbangan dari pengertian perkawinan menurut Undang-Undang ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dapat kita simpulkan bahwa perkawinan erat hubungannya dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur rohani juga mempunyai peranan penting.

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

- 1) Digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara janis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan beberapa negara Barat.
- 2) Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengangung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan

---

<sup>6</sup>Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 288.

temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

- 4) Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.<sup>7</sup>

Perkawinan menurut Komplikasi Hukum Islam dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 antara lain sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqam ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup>

#### Pasal 3

Perawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Ditinjau dari beberapa pengertian perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama dan bertujuan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahma* dan memperolah keturunan serta menghindari perzinahan dan menjaga ketentraman baik jiwa maupu batin.

## 2. Pengertian Dispensasi

Dalam kamus hukum, dispensasi diartikan suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun Undang-Undang yang

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 75-76.

<sup>8</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, hal. 14.

<sup>9</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, hal. 14.

seharusnya berlaku secara formil; Suatu keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan-peraturan.<sup>10</sup>

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan (1) pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan: ia mendapat- bebas membayar uang kuliah karena orang tuanya tidak mampu; (2) Huk pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dl hukum administrasi negara).<sup>11</sup>

## **B. Syarat Sahnya Perkawinan**

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan baik yang menyangkut keturunan (Anak) maupun harta. Karena sahnya dalam suatu perkawinan itu sangat penting maka ada beberapa syarat yang harus dipatuhi antara lain;

### **1. Syarat Perkawinan Menurut Fikih Munakahat**

Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada tiga:<sup>12</sup>

#### **a. Persaksian**

Akad pernikahan adalah diantara semua akad dan transaksi yang mengharuskan saksi menurut jumhur *fuqaha'*, hukumnya sah menurut syara'. Akad

---

<sup>10</sup>Marwan, & Jimmy P, *Kamus HUKUM Dictionary Of Law Complate Edition* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 174.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 270.

<sup>12</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahad (Khitbah, Nikah, dan Talak)* (Jakarta: Amzah, November 2009), hal. 100.



dan transaksi selain nikah, persaksiannya sunnah menurut pendapat mayoritas *fuqaha'*. Perintah mendatangkan saksi dalam jual beli hukumnya sunnah sebagai Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:282

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahannya:

“Dan persaksikanlah ketika engkau berjual beli”.<sup>13</sup>

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib.

#### b. Wanita Yang Di Nikahi Bukan Mahram

Wanita yang dinikahi syaratnya bukan yang diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya. Jika akad nikah tetap diselenggarakan pada wanita-wanita tersebut padahal ia mengetahui keharamannya maka batal akad nikahnya dan akad tersebut tidak berpengaruh apa-apa. Jikalau ia tidak mengetahui keharamannya, lalu mereka tahu dikemudian hari maka bagi mereka wajib berpisah dengan segera. Jika tidak, pengadilan yang harus memisahkan antara mereka berdua dengan paksa, jika tidak dengan kesadaran mereka sendiri.

#### c. Shighat Akad

*Shighat* akad memberi makna untuk selamanya. Artinya, tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun pada waktu yang pendek. Pernikahan yang dibatasi dengan waktu adalah *fasid* (rusak), karena tidak bertujuan sebagaimana yang dimaksud pernikahan syar'I, yakni pergaulan yang abadi, memperoleh keturunan, dan pendidikannya. Ia bermaksud dalam pernikahan tersebut

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 59.

untuk memenuhi kebutuhan sementara, masa pernikahan habis karena kebutuhannya telah habis. Misalnya, seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan: “ Aku nikahi engkau selama aku tinggal di negeri ini”. Inilah yang di sebut dengan nikah *mut’a* dan sudah di jelaskan secara terperinci di atas.

## **2. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Syarat perkawinan menurut Undang-Undang telah diatur dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam:<sup>14</sup>

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan

---

<sup>14</sup>Tim Permata Pres, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, kewarganegaraan*, (Permata Pres), 2015 hal.4.

ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### **3. Syarat Perkawinan Menurut KHI**

Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu ada dua:<sup>15</sup>

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karna haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai.
  - a) Syarat-syarat pengantin pria.
    - a. Calon suami beragama islam.
    - b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
    - c. Orangnya diketahui dan tertentu.
    - d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
    - e. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
    - f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
    - g. Tidak sedang melakukan ihram.

---

<sup>15</sup>M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, hal. 24

- h. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- i. Tidak mempunyai istri empat.
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan.
  - a. Beragama islam atau ahli kitab.
  - b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci).
  - c. Wanita itu tentu orangnya.
  - d. Halal bagi calon suami.
  - e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
  - f. Tidak dipaksa/ikhtiar.
  - g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

## 2) Syarat-syarat Ijab Qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu seperkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

## 3) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, balik, sehat dan adil (tidak fasik).

## 4) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, balik, berakal, melihat, daan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad

nikah. Tetapi menurut Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.

### **C. Tujuan Pernikahan**

Setiap perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).<sup>16</sup> Paling tidak ada empat macam yang menjadi tujuan dalam pernikahan yang harus dipahami oleh calon suami dan istri . Keempat tujuan pernikahan itu adalah:<sup>17</sup>

#### **1. Menentramkan Jiwa**

Apabila sudah terjadi akad nikah, siwanita merasa jiwanya tentran, karena sudah merasa ada yang melindugi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dan sebaliknya, sisuami pun merasa tentram pula, karena sudah ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan, Allah berfirman: dalaam QS al-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal. 85.

<sup>17</sup>Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015) hal. 3.

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrum dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).<sup>18</sup>

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan isteri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami isteri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

## 2. Mewujudkan Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak keturunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusi ini diungkapkan oleh Allah dalam QS al-Nahl/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ  
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik”. (QS. An-Nahl: 72).<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya.

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 21.

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 374.

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila pernikahannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga tersasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang-orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.

### 3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga pernikahan, supaya tidak terjadi penyimpangan dan tidak lepas begitu saja sehingga tidak bertentangan dengan norma-norma, adat istiadat.

Kecendrungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecendrungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Nisa’/4:1

يَتَأْتِيَا النَّاسُ آتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (QS.An-Nisa: 1).<sup>20</sup>

Dari ayat tersebut, dapat dipahammi bahwa tuntutan pengembangbiakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya perlu diingat

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 99.



bahwa perintah "*bertakwa*" kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak keturunannya juga akan menjadi anak keturunan yang baik-baik.

#### 4. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan itu dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan untuk mewujudkan bagi manusia itu merupakan kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya (*tabi'atnya*), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam pernikahan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa pernikahan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

### **D. Hukum Pernikahan**

#### **1. Hukum Pernikahan Menurut Hukum BW**

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur oleh hukum BW di dalam buku pertama, yang materi pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Perkawinan menurut BW, hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan (Ps. 26), ini berarti BW tidak mengakui perkawinan menurut hukum agama. BW melarang melakukan upacara pernikahan menurut hukum agama, sebelum diadakan perkawinan menurut Undang-Undang. Ahli agama yang melanggar peraturan ini dapat dihukum (Ps. 530 KUHPidana).
- b. Perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kesukarelaan atau persetujuan dari kedua calon suami istri (Ps. 28).

---

<sup>21</sup>Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hal. 71.

- c. Dalam waktu yang sama laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu istri, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang suami (Ps. 27).
- d. Batas usia untuk kawin bagi seorang laki-laki 18 tahun dan bagi seorang perempuan 15 tahun. Tetapi jika ada hal-hal yang mendesak atau alasan-alasan yang penting, hakim pengadilan negeri dapat memberikan dispensasi terhadap calon suami dan calon isteri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan (Ps. 29).
- e. Hukum BW mengharuskan adanya izin dari orang tua atau wali bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tetapi belum genap berumur 21 tahun (Ps. 35 dan 330).
- f. Perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan (a) darah (**nasab**) baik dalam garis lurus ke atas, ke bawah, atau kesamping; (b) keiparan (**semenda**); dan (c) sepupu (Ps. 30). Dalam hal hubungan keiparan dan sepupu itu dapat dimintakan dispensasi di pengadilan (negeri). Di samping itu terdapat juga larangan-larangan kawin, yaitu (a) larangan kawin untuk ketiga kalinya antara orang-orang yang sama; (b) larangan kawin bagi janda, kecuali setelah lewat waktu (tunggu) 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan; dan (c) larangan kawin bagi mereka yang diputuskan hakim telah salah karena berzinah dengan teman berzinanya (Ps. 32-35).
- g. Perkawinan dinyatakan sah bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan dilakukan di muka pegawai catatan sipil (PCS) serta disaksians oleh 2 orang yang telah berumur 21 tahun baik dari pihak keluarga maupun bukan (Ps. 71-80).

- h. Perkawinan dengan upacara keagamaan baru boleh dilangsungkan apabila ketentuan tersebut dalam butir (g) di atas telah dipenuhi (Ps.81).
- i. Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan dapat dicegah apabila tidak dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang diperlukan dan atau melanggar larangan-larangan perkawinan yang telah ditentukan di dalam BW.
- j. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terbukti telah melanggar syarat-syarat perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh keputusan hakim pengadilan negeri.
- k. Harta benda kedua mempelai suami istri menjadi milik bersama sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali kalau diadakan perjanjian kawin untuk menyimpan dari prinsip tersebut.
- l. Perkawinan putus bila (a) salah satu pihak meninggal dunia, (b) terjadi perceraian, (c) salah satu pihak menghilang selama 10 tahun dan pihak lain diberi izin oleh hakim untuk kawin lagi, dan (d) perkawinan dinyatakan putus dengan keputusan hakim, setelah kedua pihak hidup berpisah selama 5 tahun (Ps. 199).
- m. Tuntutan perceraian perkawinan harus dimajukan kepada pengadilan negeri, dengan alasan-alasan: (a) berzina, (b) meninggalkan tempat tinggal dengan itikad jahat, (c) dihukum 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, (d) melakukan penganiayaan yang membahayakan terhadap yang lain (Ps. 208).
- n. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut perceraian tersebut, dapat juga digunakan sebagai alasan untuk menuntut perpisahan meja dan ranjang, di samping alasan-alasan yang lain yang ditentukan dalam BW (Ps. 233) dan perpisahan meja dan ranjang batal demi hukum apabila suami isteri kembali berdamai (Ps. 248).

## 2. Hukum Pernikahan Menurut Agama

Nikah, suatu *aqad syar'i* (ikatan keagamaan) yang dianjurkan syara. hukum yang tersebut ini diijma'i oleh segenap *mujtahidin* tidak ada *khilaf* padanya.<sup>22</sup>

Bermula nikah itu sunnah bagi orang yang ingin menikah, itupun dengan syarat jika dia dapat memenuhi belanja nikah seperti mahar, pakaian, dan nafkah. Dan jika dia tidak dapat memenuhi belanja nikah tersebut maka lebih utama baginya meninggalkan nikah. Hendaklah dipecahkannya akan keinginannya untuk menikah tersebut dengan melajimi puasa.<sup>23</sup>

Para fuqaha mengkalisifikasikan hukum hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpulang kepada kondisi pelakunya.<sup>24</sup>

### 1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan, menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah menikah.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinaan mana kalah ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tak sanggup. Selanjutnya, Malikiyah memberikan beberapa kriteria tentang wajibnya menikah bagi seseorang, yaitu:

- a. Apabila takut dirinya akan terjerumus kedalam lembah perzinaan.
- b. Untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, atau mampu berpuasa tapi tidak bisa mengekam nafsu.

---

<sup>22</sup>T. Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) hal. 264.

<sup>23</sup>Muhammad Arsyad al-Banjariy, *Kitāb al-Nikāh* (Martapura: Yayasan Pendidikan Dalam Pagar, 2002) hal. 1.

<sup>24</sup>Sabri Samin & Andi Narmaya Aroeng, *FIKIH II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), hal. 8.

c. Tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia.

## 2) Sunnah

Bagi manusia yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, sebab menjalani hidup tanpa nikah sama sekali tidak dibenarkan dalam islam.

Ulama syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunat bagi orang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta mampu melakukan seksual.

## 3) Mubah

Bagi orang-orang yang tak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera menikah dan/atau alasan yang mengharamkan menikah. Ulama Hambali menyatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

## 4) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

Ulama dikalangan Malikiyah menyatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada isterinya. Adapun dari kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya kepada istrinya.

#### 5) Haram

Pernikahan haram hukumnya bagi orang tidak berkeinginan karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahiriah kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam.

Bagi perempuan bila ia sadar bahwa dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batin suaminya, karena sakit jiwa atau sakit lainnya, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib menerangkan semua itu kepada calon suaminya ibarat seorang pedagang yang harus menerangkan keadaan barang-barangnya yang akan di jual.

### **E. *Prosedur Pernikahan***

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penanda tanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.<sup>25</sup>

#### 1. Pemberitahuan kehendak nikah

##### a. Persiapan

---

<sup>25</sup>Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003) hal. 18.

Pembantu PPN (Pencatat Nikah) dalam memberikan penasehatan dan bimbingan agar mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan hendaknya melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- 1) Masing-masing calon mempelai mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestui. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas.
- 2) Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum *munakahat* maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
- 3) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai diberikan suntikan imunisasi *tetanus toxoid*.<sup>26</sup>

#### b. Pemberitahuan

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pembantu PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak menikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan:

---

<sup>26</sup>Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, hal. 6-7.



- 1) Surat persetujuan calon mempelai (Model N3).
- 2) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya. Untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotokopinya).
- 3) Surat keterangan tentang orang tua (Model N4).
- 4) Surat keterangan untuk nikah (Model N1).
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
- 6) Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
- 7) Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh Model N6 jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
- 8) Surat izin dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan Pasal 7 ayat (2).
- 9) Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- 10) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum *munakahat* maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, hal. 7-8.

## 2. Pemeriksaan Pernikahan

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai, apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah dan instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap calon suami istri dan wali nikah di tulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir model NB). Ruang II, III dan IV rangkap dua. Hasil pemeriksaan dibaca kembali dan jika diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kedua lembar Model NB tersebut pada halaman 3 ditanda-tangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Selesai pemeriksaan, surat-surat keterangan yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan lembar model NB kemudian dibuat pengumuman.<sup>28</sup>

## 3. Pengumuman Kehendak Pernikahan

Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (Model NC) setelah persyaratan terpenuhi. Pengumuman dipasang di tempat-tempat yang mudah diketahui umum, seperti balai desa, masjid, mushalla dan lain-lain, terutama di papan pengumuman di depan rumah Pembantu PPN.

Akad nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya bertugas ke

---

<sup>28</sup>Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, hal. 8-9.

luar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini, Pembantu PPN memberikan nasehat perkawinan kepada calon suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, pentingnya imunisasi TT bagi calon istri serta pentingnya pengamalan kehidupan beragama dalam keluarga.<sup>29</sup>

#### 4. Akad Nikah dan pencatatannya

Setelah lewat masa pengumuman, akad nikah dilaksanakan di bawah pengawasan dan di hadapan Pembantu PPN kemudian dicatat dalam lembar Model NB halaman 4 dan ditanda-tangani oleh suami istri, wali nikah, dan saksi-saksi serta Pembantu PPN yang mengawasinya.

Selambat-lambatnya 15 hari setelah dilaksanakannya akad nikah, satu lembar Model NB yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dikirimkan kepada PPN yang wilayahnya beserta biaya nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Model NB tersebut diperiksa dan diteliti, PPN kemudian mencatat dalam Akta Nikah dan membuat Kutipan Akta Nikahnya rangkap dua. Selanjutnya PPN menerima dua Kutipan Akta Nikah dari PPN untuk disampaikan kepada masing-masing suami istri.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, hal. 9-10.

<sup>30</sup>Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, hal. 10.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Dan Lokasi Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Pada tahap penyelesaian penelitian, perlu menggunakan beberapa metode untuk memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penelitian ini. Jenis penelitian yang dilakukan penulis lebih cenderung menggunakan jenis penelitian dengan metode *field research*, narasumber dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaen Gowa, Penulis juga melakukan wawancara langsung berkenaan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, setelah itu barulah penulis menggunakan Jenis Penelitian *Library Research* melakukan pengambilan data atau arsip perkara agar data yang telah diambil betul-betul sesuai dengan rumusan masalah.

Penelitian ini berfokus menelusuri tentang pemberian Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa).

###### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk melanjutkan data dan informasi diperoleh berdasarkan kasus dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alasan bahwa sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh peneliti terhadap permohonan pengajuan dispensasi nikah di bawah umur, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dispensasi nikah di bawah umur dilakukan di Pengadilan Agama apabila pegawai pencatat nikah menolak

memberikan izin nikah dikarenakan faktor umur belum mencukupi berdasarkan Undang-Undang pernikahan Tahun 1974.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah:

1. Yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara yang akurat berkaitan dengan judul skripsi.

## **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang dilakukan oleh peneliti terdapat dua sumber data yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak yang terkait dalam hal ini yang memberikan dispensasi nikah kepada

anak di bawah umur pada Pengadilan Agama guna untuk memberikan keterangan-keterangan yang terkait dalam penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan materi penulisan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini serta penetapan perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Library Research**

*Library Research*; yakni pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

#### **2. Metode Field Research**

*Field Research*; yakni berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dalam arti penulis mengadakan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data. Wawancara melalui instansi yakni Pengadilan Agama yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### **E. Instrumen Penulisan**

Instrumen penulisan yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara,

dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

**F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Pengadilan Agama Sungguminasa terletak di Jalan Masjid Raya Sungguminasa Kabupaten Gowa, dimana kabupaten Gowa tersebut adalah merupakan salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan kota metropolitan Makassar. Di samping itu pula, kalau dilihat dari perspektif jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang wilayah yurisdiksinya meliputi 18 Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa dengan letak geografis antara 119.30' sampai dengan 120.12' Bujur Timur dan 05.10' sampai dengan 05.40' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.883.33 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Gowa menempati posisi penting dan strategis karena disamping sebagai penyanggah utama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, juga berbatasan langsung dengan beberapa kota di Sulawesi Selatan, di antaranya Kabupaten sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar serta sebelah barat bertasan dengan Kota Makassar.

Penduduk Kabupaten Gowa terdiri atas beberapa etnis dan suku, di antaranya suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan Jawa serta suku lainnya. Namun bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa daerah Bugis dan Makassar, terutama yang tinggal di ibukota kabupaten.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa tahun 2007 berjumlah 586.069 jiwa dan berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Agama pemeluk Agama islam di Kabupaten Gowa adalah memiliki persentase sebesar 99,15 % dengan perincian sebagai berikut:

➤ Islam	= 581.855
➤ Kritten Protestan	= 2.435
➤ Kristen Katolik	= 1.356
➤ Hindu	= 154
➤ Budha	= 269

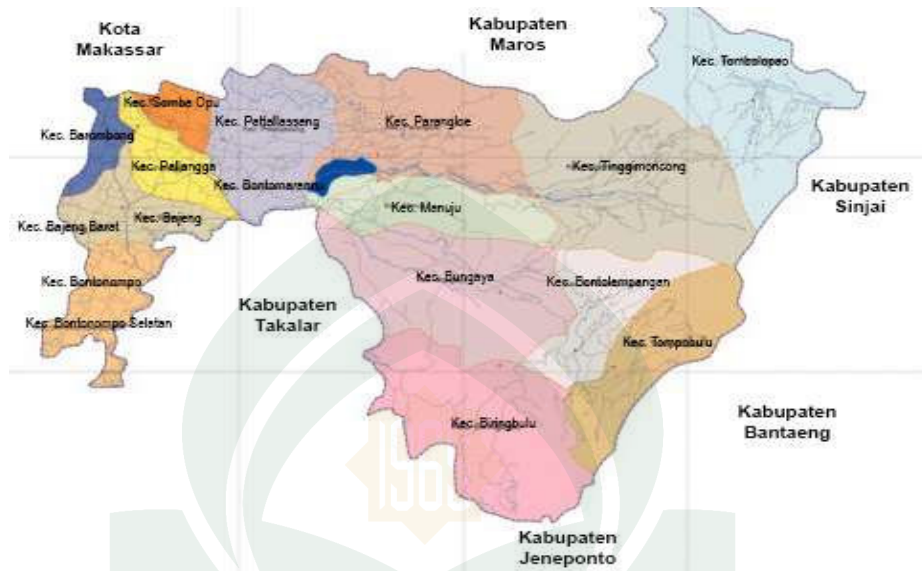
Melihat situasi dan kondisi volume kerja terutama jumlah perkara yang masuk mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di samping itu pula jumlah personil pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa walaupun terasa masih kurang, tetapi sudah cukup mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.<sup>1</sup>

Kabupaten Gowa yang beribukota Sungguminasa memiliki luas wilayah 1.883,33 km<sup>2</sup> yang telah di distribusi kedalam 18 Wilayah Kecamatan dan 169 Desa/Kelurahan, Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang termasuk salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang mempunyai motto Gowa Bersejarah adalah merupakan sosok motivator dalam rangka memacu aktivitas di bidang pembangunan guna mewujudkan Gowa sebagai kawasan industri dan pariwisata sehingga dengan demikian menjadi sering terjadi berbagai permasalahan yang timbul.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, "Profil Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan", 28 Januari 2017.

<sup>2</sup>Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, "Profil Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan", 28 Januari 2017.



## ***B. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa***

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” .Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan “Dalam hal penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Tim Permata Pres, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, kewarganegaraan*, (Permata Pres), 2015 hal. 5.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah ada 2 (dua) yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.<sup>4</sup>

Faktor Internal berarti yang terdapat pada diri pribadi si anak yang bersangkutan. Dikatakan si anak karena yang mengajukan adalah rata-rata orang tua dari si anak, misalnya ada komitmen bahwa yang bersangkutan ini harus segera menikah artinya tidak dilihat bahwa yang bersangkutan hamil atau tidak, ada juga faktor yang menyebabkan misalnya sudah terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi sebelum menikah, walaupun itu tidak hamil, apalagi hamil. Walaupun itu hanya di sentuh-sentuh tapi itu bukanlah muhrin bagi yang belum melangsungkan pernikahan karena yang pantas untuk menyentuh itu adalah orang yang telah menikahinya atau muhrimnya. Yang paa intinya dia sadar bahwa telah melakukan sentuhan walaupun tanpa persetujuan, dan menganggap dirinya dirinya harus bertanggung jawab. Jadi artinya walaupun mau hamil atau tidak, mau di sentuh atau tidak, kalau yang bersangkutan sudah merasa bahwa dia mampu menikah itu bisa dikatakan sebagai faktor-faktor internal.

Faktor Eksternal, yaitu bersumber dari orang tua, orang sekitar atau lingkungan. Yang di maksud seperti ini, jika saja yang menyuruh menikah itu orang tua dari pihak laki-laki karena melihat anaknya sering membawa perempuan dan sudah mampu menikah, atau dari pihak orang tua perempuan, melihat anaknya sering dibawa atau pergi bersama laki-laki. Maka orang tua dari yang bersangkutan menyimpulkan sebaiknya kalian menikah saja, dari pada nanti di khawatirkan terjerumus ke perizahan atau bisa saja lingkungan atau keluarga yang mengharuskan bersangkutan menikah.

---

<sup>4</sup> Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 2 Februari 2017

Oleh karena itu Undang-Undang mengatur usia minimal untuk melangsungkan pernikahan dimana usia laki-laki harus mencapai 19 tahun dan perempuan mencapai 16 tahun. Jika usia dari laki-laki dan perempuan belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan maka harus mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Kapan itu dipaksakan untuk menikah tanpa pemberian dispensasi dari Pengadilan Agama maka yang bersangkutan tidak mempunyai buku nikah.

Untuk itu ada beberapa prosedur dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah antara lain:

1. Meja 1.

Orang tua dari yang ingin diberikan dispensasi nikah datang ke Pengadilan untuk melaporkan mengajukan dispensasi terhadap anaknya maka pihak Pengadilan memerintahkan untuk ke POSYAKUM (pos pelayanan hukum) guna untuk menceritakan alasan untuk mengajukan dispensasi, setelah pihak Pengadilan mendengar alasan dari yang berkepentingan maka dibuatkanlah permohonan.

2. Kasir

Setelah pemohon dibuatkan permohonan maka pemohon ke kasir untuk menanyakan berapa biaya penanganan dispensasi nikah kemudian setelah ditaksir berapa biaya yang dibutuhkan lalu pemohon dengan instrument dari Pengadilan berupa surat kuasa untuk membayar (SKUM) biaya perkara maka pemohon ke Bank yang ditujukan guna untuk membayar biaya perkara dimana biaya tersebut sebagai panjar, kalau ada sisa dikembalikan begitupun sebaliknya.

### 3. Meja 2

Setelah pihak pemohon telah membayar biaya perkara maka pemohon kembali ke Pengadilan membawa bukti pembayaran dan meminta nomor perkara yang sudah di tentukan maka barulah permohonan tersebut dianggap telah terdaftar. Mengatur berkas perkara dan menyerahkannya kepada wakil panitera untuk di sampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Sungguminasa.

### 4. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan

Berkas perkara yang telah lengkap diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk Penetapan Majelis Hakim (PMH).

### 5. Ketua Majelis

Majelis hakim yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan menentukan hari sidang, membuat instrumen panggilan sidang.

### 6. Ketua Panitera

Menunjuk Panitera sidang yang mendampingi Majelis Hakim, memberikan berkas permohonan dan Jurusita yang melakukan pemanggilan.

### 7. Jurusita/Jurusita Pengganti

Menerima instrumen panggilan dari ketua majelis dan menyerahkannya kepada kasir untuk pencairan biaya pemanggilan dan Melaksanakan pemanggilan terhadap pihak berperkara<sup>5</sup>

Adapun yang dari segi administrasi yang perlu disiapkan adalah KK (kartu keluarga), KTP (kartu tanda penduduk), akte kelahiran, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak diwajibkan untuk di cantumkan dalam permohonan cukup di perhatikan saja. Akan tetapi, kalau ingin dijadikan sebagai alat bukti bisa diajukan dari awal pihak

---

<sup>5</sup>Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 17 Januari 2017

pemohon mendaftar. Tapi perlu diingat, bahwa yang namanya pembuktian itu di Persidangan bukan dipendaftaran karena ini sifatnya dispensasi maka untuk mengetahui umur dari yang ingin diberikan dispensasi harus memperlihatkan akte kelahiran pada saat awal pendaftaran dan dijadikan sebagai alat bukti. Namun ketika tidak sampai ketahap pembuktian maka diperlukan foto copy KK (kartu keluarga), KTP (kartu tanda penduduk), Akte kelahiran dan diberi materai 6000 serta stempel pos akan tetapi jika sampai kepembuktian pemohon harus memperlihatkan aslinya karena jika bukti surat itu tidak bisa dicocokkan dengan aslinya maka secara formil tidak memenuhi syarat.<sup>6</sup>

Perlu diketahui bahwa ada perbedaan antara pengajuan dispensasi dengan penganjuan perkara lainnya, dimana harus diketahui bahwa ada 2 (dua) pengajuan di Pengadilan agama yaitu Voluntair dan Contentious. Voluntair disebut juga dengan permohonan, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjukan kepada ketua Pengadilan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Sedangkan Contentious adalah perkara perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berpekara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dan diajukan kepada Pengadilan, dimana pihak yang mengajukan gugatan disebut dan bertindak sebagai tergugat. Didalam pemberian nomor putusan juga ada perbedaan antara keputusan yang bersifat Voluntair dan yang bersifat Contentious. Dimana perbedaanya yaitu pada kasus yang bersifat Voluntair 73/Pdt.P/2016/PA Sgm sedangkan yang bersifat Contentius 73/Pdt.G/2016/PA Sgm. Dalam kasus yang bersifat Voluntair itu hanya untuk

---

<sup>6</sup>Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 17 Januari 2017.

kepentingan diri sendiri, sehingga persidangan biasanya hanya 1 (satu) kali sidang, sidang sudah bisa langsung putus seperti halnya dispensasi. Berbeda dengan kasus yang bersifat Contentious karena sifatnya yang tidak diperuntukkan untuk diri sendiri, maka Persidangannya tidak dapat putus hanya dengan 1 (satu) kali sidang, karena melibatkan banyak orang. Berbeda pula dengan penetapan hari sidang antara kasus yang bersifat Voluntair dan contentious pada bundel A di Pengadilan.

Bundel A itu berisikan dengan berita Panggilan dan penetapan hari sidang dan telah dicantumkan bahwa yang bersangkutan harus membawa alat bukti atau pembuktian pada kasus yang bersifat permohonan. Berbeda halnya dengan gugatan, kasus yang bersifat gugatan bundel A mencantumkan isi gugatan yang bersangkutan kemudian diberikan untuk pihak lawan agar gugatan penggugat bisa jawab pada Persidangan.

Kemudian Persidangan yang bersifat Voluntair, selain dari sidangnya yang sederhana dan bisa putus hanya dalam 1 (satu) kali sidang biayanya pun otomatis lebih ringan karena hanya sepihak saja.

Dalam kasus Voluntair dengan nomor putusan 73/Pdt.g/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa yang mengajukan permohonan adalah kedua orang tua dari anak yang akan diberikan dispensasi. Namun sebenarnya bisa hanya salah satu dari orang tua saja yang mengajukan, tetapi tidak dilarang juga untuk mengajukan ke 2 (dua) orang tuanya atau walinya. Apabila sudah ada jadwal sidang sebaiknya ke 2 (dua) calon mempelai untuk hadir di Persidangan walaupun hanya salah satu dari calon mempelai yang belum cukup umur. Tujuannya agar majelis hakim menyakini bahwa perkara ini bisa dikabulkan walupun sebenarnya yang bersangkutan tidak hadir tidak jadi masalah, tetapi terkadang majelis hakim



berkeinginan untuk meyakinkan alat bukti dengan memperoleh keterangan langsung dari calon mempelai maka dari itu sebaiknya menghadirkan ke 2 (dua) calon mempelai yang ingin menikah.

Keterangan dari calon mempelai dapat terlihat apakah calon mempelai sudah bisa dikatakan dewasa atau belum karena sesungguhnya kedewasaan seseorang tidak hanya dapat dilihat dari fisik tetapi dari pola pikir seseorang. Ketika majelis hakim bertanya kepada calon mempelai disitu kita dapat menilai kedewasaannya, selain itu kejiwaan juga akan terlihat serta mengetahui bagaimana komitmen terhadap pernikahan karena jangan sampai yang menginginkan pernikahan itu adalah orang tua sedangkan calon mempelai belum ingin mau menikah. Itu merupakan salah satu masalah yang biasanya mengakibatkan perceraian.

Berdasarkan keterangan calon, mempelai hakim juga dapat menilai bahwa calon mempelai sudah mampu melaksanakan kewajibannya dalam hubungan suami istri dari segi memberi nafkah lahir maupun batin. Selain dari itu pengajuan dispensasi juga sebenarnya hanya persoalan administrasi saja, begitupun dengan umur bukan salah satu alasan yang menyebabkan seseorang tidak bisa menikah, melainkan yang dapat menentukan seseorang bisa menikah adalah yang mampu menjalankan kewajibannya. Bahkan terkadang ada seseorang yang umurnya baru 16 (enam belas) tahun dia sudah berfikir dewasa dan sudah mampu berfikir jernih dalam menyelesaikan masalah, bahkan ada orang yang sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun tapi pikirannya masih kekanak-kanakan. Maka dapat disimpulkan apabila calon mempelai hadir di Persidangan dan sudah memberikan keterangan dan memang itu adalah kehendak yang bersangkutan untuk menikah, maka permohonan dispensasi dikabulkan. Berbeda halnya apabila keinginan orang tua saja karena dengan alasan

siwanita sudah hamil lantas silaki-laki ini tidak mau menikahi itu tetap diberikan dispensasi itu dari sisi lainnya. Karena secara umum kita dari pihak pengadilan menghindari yang namanya pernikahan yang karena terpaksa dan pada akhirnya itu tidak baik.<sup>7</sup>

Adapula syarat utama yang harus dalam pengajuan dispensasi nikah dimana syarat tersebut dapat dilihat dari kepentingan individunya, misalkan syarat utama yaitu yang bersangkutan harus di bawah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan dibawah 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki. Kalau sudah di atas 16 (enam belas) bagi perempuan dan 19 (Sembilan belas) bagi laki-laki itu sudah tidak wajib lagi melakukan permohonan dispensasi. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan “Dalam hal penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Selanjutnya syarat yang lain dan biasa di sebutkan juga di dalam permohonan yaitu bahwa si laki-laki ini adalah perjaka dan si perempuan ini adalah perawan akan tetapi ketika salah satu dari mempelai sudah menikah walaupun masih di bawah umur dan sudah bercerai majelis hakim harus mengetahui bagaimana status perceraianya apakah sudah resmi bercerai atau belum. Dan yang berkepentingan harus datang di Pengadilan serta mengetahui apa yang akan dilakukan di Pengadilan dalam artian itu jelas kepentingannya atau masalahnya, karena jangan sampai seseorang merasa terbebani terhadap sesuatu yang tidak perlu, misalkan umur calon mempelai itu 18 (delapan belas) tahun lebih dan kurang 7 (tujuh) hari lagi barulah cukup 19 tahun, masalah seperti ini tidak diwajibkan

---

<sup>7</sup>Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 17 Januari 2017.

melakukan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan waktunya sudah tidak lama lagi umur si anak sudah cukup 19 (sembilan belas) tahun beda halnya apabila umur anak masih kurang beberapa bulan atau tahun itu diperlukan pertimbangan lalu mengajukan dispensasi.<sup>8</sup>

Dilihat dari sisi Undang-Undang, bahwa usia itu adalah tolak ukur yang paling nyata terhadap pola pikir seseorang sehingga harus diatur karena apabila kedewasaan itu tidak bisa diukur maka semua orang atau manusia sudah bisa dinyatakan cakap hukum. Hal itu penyebab sehingga harus ada aturan mengenai usia yang bisa dikatakan cakap hukum seperti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Dari sisi umur sudah bisa dijadikan sebagai landasan kalau seseorang itu sudah dewasa atau belum, ketika seorang pria berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan dibawah 16 (enam belas) tahun belum dinyatakan bercakap hukum maka dalam pernikahan harus mengajukan permohonan dispensasi. Sedangkan kalau usia pria sudah 19 (sembilan belas) dan wanita 16 (enam belas) tahun tidak usah mengajukan dispensasi melainkan hanya meminta ijin dari orang tua sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun pernikahan itu adalah suatu yang bersifat asasi.

Perlu diingat bahwa pernikahan itu dipermudah tapi tidak bebas dan pernikahan itu juga sebenarnya mempunyai 5 tujuan atau syariat (menjaga agama, menjaga nyawa dan jiwa, menjaga akal dan pikiran, keturunan, dan hibjum mal).

---

<sup>8</sup>Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 17 Januari 2017.

Sebenarnya menikah itu bersifat daruri yaitu sesuatu yang sangat mendasar sehingga sesuatu yang sangat mendasar ini kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Akan tetapi, bukan sesuatu yang bebas harus diatur sedemikian rupa supaya tujuan dari pernikahan menurut Agama dapat tercapai. Maka apabila seseorang sudah merasa mampu untuk menikah dan merasa takut akan berbuat zina ketika tidak menikah maka hukumnya menjadi wajib, jadi itu salah satu arti yang dimaksud dengan tidak sebebasnya untuk melakukan yang namanya pernikahan. Ketika hukumnya sudah menjadi wajib maka pernikahan itu dilonggarkan seperti adanya dispensasi, maka ada kaidah atau aturan yang dipertegas bahwa permudahlah pernikahan dan persulitlah perceraian. Ketika seseorang sudah menikah maka pertahankanlah pernikahan itu jangan mudah untuk bercerai maka dari itu tujuan dari adanya Undang-Undang yang mengatur tentang batasan umur pernikahan. Dapat kita lihat apabila tidak ada aturan yang mengatur tentang batasan untuk melangsungkan pernikahan seorang wanita yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dan pria 19 (sembilan belas) tahun jangan sampai pernikahan itu di permainan, karena sifat dari perkawinan bukan hanya menghalalkan hubungan suami istri tapi ada banyak kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>9</sup>

Pengaruh adanya dispensasi membuat masyarakat sudah tidak lagi beranggapan bahwa yang namanya pernikahan itu adalah hak ke 2 (dua) orang tua. Jadi ketika anak masih di bawah umur masyarakat harus berfikir dalam bertindak. Maka untuk melagalkan pernikahan anak yang masih di bawah umur seseorang harus mengajukan yang namanya dispensasi, sebenarnya ini harus di dukung oleh Imam dan KUA (kantor urusan agama). Dalam pernikahan dimana Imam dan KUA (kantor

---

<sup>9</sup>Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 17 Januari 2017.

urusan agama) sebelum menikah harus mengetahui terlebih dahulu umur yang ingin dinikahkan. Sehingga apabila seseorang yang ingin menikah lantas belum cukup umur berdasarkan Undang-Undang maka disarankan untuk ke Pengadilan untuk mengajukan yang namanya dispensasi.

Selain dari itu, salah satu tugas dari Imam dan KUA (kantor urusan agama) masyarakat juga harus memiliki kesadaran sendiri bahwa ketika ingin menikah dan belum cukup umur berdasarkan Undang-Undang, maka harus ke Pengadilan guna untuk mengajukan dispensasi nikah sehingga pernikahan yang dilakukan bisa tercatat didalam lembaga pemerintahan. Selain dari itu sebagai pelindung agar terhindar dari urusan-urusan mengharuskan atau melibatkan saat mereka mempunyai anak, karena jangan sampai anak-anak kelak tidak dapat bersekolah itu disebabkan karena orang tua tidak memiliki kekuatan hukum pada pernikahannya, atau dengan kata lain sebagai penghalang dalam hal urusan administrasi.

Sering kali dihindari bahwa masyarakat berprinsip “yang penting nikah dulu agar halal” sehingga mengabaikan urusan administrasi pernikahan yang sudah diatur dalam pemerintahan itu. Salah satu penyebab mereka mendapatkan kesulitan dengan urusan administrasi salah satu contohnya saat ingin mengurus KK (kartu keluarga) pasti instansi yang terkait dalam pengurusan KK (kartu keluarga) akan meminta legitimasi nikahnya dalam hal ini buku nikah. Maka dari itu dispensasi nikah dibawah umur menjadi salah satu jalan agar terhindar dari segala hal yang bisa merugikan seseorang baik dari segi dunia.<sup>10</sup>

Apabila seseorang sudah melangsungkan pernikahan kemudian ternyata salah satu dari mempelai belum memenuhi syarat dan sudah mempunyai anak, maka

---

<sup>10</sup>Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 17 Januari 2017.

dia sebaiknya menikah ulang itu lebih baik dan juga tidak menggunakan banyak biaya. Berbeda dengan apabila seorang sudah melangsungkan pernikahan kemudian masih dibawah umur dan belum mempunyai anak maka sebaiknya mengajukan kembali dispensasi nikah agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak mesti untuk menikah kembali, cukup dengan meminta buku nikah diterbitkan karena tidak mesti dengan menikah ulang. Karena salah satu alasan dilakukannya nikah ulang apabila ada keraguan didalam pernikahan dan juga bila pernikahan itu dilangsungkan dengan menggunakan wali yang sah secara hukum. Sebagaimana yang kita maksud adalah wali nazab atau wali dari keturunan, wali hakim, wali mahkama atau wali yang ditunjuk oleh pihak perempuan.

Jika pernikahan itu dibawah umur tetap dilaksanakan tanpa dispensasi kemudian salah satu dari mempelai meninggal dunia maka yang diajukan di Pengadilan bukan lagi dispensasi, tetapi yang diajukan adalah isbat nikah sebelum mengajukan permohonan penerbitan buku nikah dan demi melindungi hak anak.

Tidak semua orang yang datang di Pengadilan mengajukan dispensasi nikah langsung diberikan dispensasi. Dia harus menceritakan terlebih dahulu seperti apa dan apakah layak diberikan dispensasi dan kewajiban Pengadilan adalah memberi keadilan dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Ketika hakim memutuskan tidak diberikan dispensasi maka seseorang bisa mengajukan kasasi karena itu adalah upaya dari permohonan tetapi itu membutuhkan waktu dan biaya yang banyak dan lama, sedangkan dispensasi itu membutuhkan waktu yang cepat. Maka sebaiknya mengajukan ulang dan perlu disadari kenapa pengajuan dispensasi ditolak, karena jangan sampai ketika permohonan sudah

---

<sup>11</sup>Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 17 Januari 2017.

diterima. dan pada saat sidang saudara dan saksi tidak pernah datang, maka dari itu sebaiknya seseorang yang bermohon untuk diberikan dispensasi nikah harus mempersiapkan diri dan bukti yang akan di tunjukkan pada persidangan, agar persidangan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada saat sidang agar apa yang kita inginkan dapat tercapai.

Pernikahan di bawah umur karena biasa seseorang belum mampu untuk menerima keadaan dalam rumah tangga maka biasanya sering terjadi pertengkaran, disini orang juga ikut campur didalamnya tetapi hanya sebagai penasehat dan jangan memihak.<sup>12</sup>

### ***C. Pertimbangan hakim penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur pada penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm***

#### **1. Posisi kasus**

- **Pemohon I**, umur 49 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2 (S.2), pekerjaan Swasta (Konsultan Bisnis), bertempat tinggal di Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
- **Pemohon II**, umur 50 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III (D.III), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, bertempat tinggal di Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor

---

<sup>12</sup>Muhammad Najmi Fajri (34 tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, *Wawancara*, 17 Januari 2017.

73/Pdt.P/2016/PA Sgm, tanggal 27 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Muh. Nur Fajri umur 18 tahun (lahir tanggal 28 Oktober 1997) sebagaimana yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 446/UM/CS/1997, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa;
2. Bahwa kedua orang tua dari Muh. Nur Fajri masih hidup yaitu Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Nur Fajri *bin* Much Zuhri tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Isti Yuni Damayanti *binti* Drs. H. Muhammad Idris berumur 17 tahun (lahir tanggal 4 Juni 1998), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kompleks Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim) dengan perempuan tersebut dan tidak mungkin lagi dipisahkan;
5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama oleh para Pemohon seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, maka para Pemohon sebagai orang tua bermaksud untuk menikahkan Muhammad Nur Fajri dengan Isti Yuni Damayanti tersebut namun oleh karena Muhammad Nur Fajri belum cukup umur untuk menikah yaitu belum genap berumur 19 tahun oleh karena itu maka para



Pemohon memohon untuk diberikan izin atau dispensasi nikah kepada Muh. Nur Fajri untuk bisa dinikahkan dengan perempuan yang bernama Isti Yuni Damayanti;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
7. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II tersebut masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua laki-laki tersebut telah sama-sama setuju atas rencana pernikahan Muh. Nur Fajri dengan Isti Yuni Damayanti;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Propinsi Sulawesi Barat untuk menikahkan anak pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sunguminasa terkait dengan Dispensasi Nikah;
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sunguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Penetapan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sunguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh. Nur Fajri untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang Isti Yuni Damayanti;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar para Pemohon mempertimbangkan kembali niatnya dan tidak menikahkan anak kandungnya karena masih berumur 18 tahun (berusia di bawah 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Muh. Nur Fajri, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), NIK : 7306081401670003, tanggal 03-05-2013, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK : 7306084404660006, tanggal 03-05-2013,

bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1.

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarejo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Nomor 494/33/III/1994, tanggal 27-03-1994, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Fajri, Nomor 446/UM/CS/1997, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Nur Nuhung bin Nuhung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena berteman dengan Pemohon I.
  - Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri karena anak tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun.
  - Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni Damayanti.
  - Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan Isti Yuni Damayanti adalah sepasang kekasih dan telah lama menjalin hubungan asmara.

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) sangat susah untuk dipisahkan.
  - Bahwa para Pemohon telah datang melamar ke orang tua calon istri anak para Pemohon, namun tanggal perkawinan belum ditetapkan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa.
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab.
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.
2. Dg Rola bin Dg Nai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon I.
  - Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri karena anak tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun.
  - Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni Damayanti.
  - Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan Isti Yuni Damayanti adalah sepasang kekasih dan telah lama menjalin hubungan asmara.

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) sangat susah untuk dipisahkan.
- Bahwa para Pemohon telah datang melamar ke orang tua calon istri anak para Pemohon, namun tanggal perkawinan belum ditetapkan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri yang masih berumur 18 tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama Muh. Nur Fajri telah hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mempertegas dan membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gowa yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarejo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Nomor 494/33/III/1994, tanggal 27-03-1994, telah terbukti

bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan Muhammad Nur Fajri adalah anak kandung para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (Muhammad Nur Fajri), telah terbukti bahwa anak para Pemohon umurnya masih di bawah umur 19 tahun yaitu 18 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Nur Nuhung bin Nuhung dan Dg Rola bin Dg Nai, kedua saksi para Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., jo. Pasal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Muh. Nur Fajri akan tetapi anaknya tersebut masih berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni Damayanti.
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti telah menjalin hubungan (berpacaran intim) dan sangat sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan.

- Bahwa anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga, demikian pula calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) juga telah siap pula menjadi istri/ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut baik bukti P.1, P.2, dan P.3, maupun keterangan saksi-saksi (Nur Nuhung bin Nuhung dan Dg Rola bin Dg Nai), Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti hubungannya sudah sangat dekat (berpacaran intim) sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan.
- Bahwa baik anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) maupun calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) sama-sama telah siap membina rumah tangga dan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti sudah terjalin sedemikian erat dan bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.



Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka berdua sudah sangat ingin membina rumah tangga oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan keinginan para Pemohon semata atau tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh para Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti binti Drs H. Muhammad Idris) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf ( c ) dan ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk pada menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (Muh. Nur Fajri) didorong karena adanya fakta (feitelijke grounden) bahwa anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam dan perundang-

undangan, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) menunjukkan kesiapan keduanya, baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga menunjukkan urgensi pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang bila ditunda justru berpotensi mengganggu hubungan silaturahmi antara dua keluarga bahkan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti), terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:

*“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan para Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Isti Yuni Damayanti binti Drs H. Muhammad Idris.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (Isti Yuni Damayanti).
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari *Selasa*, tanggal *31 Mei 2016 M.*, bertepatan dengan tanggal *24 Syakban 1437 H.*, oleh kami *Ahmad Jamil, S.Ag.*, Ketua Majelis, *Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.*, dan *Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.*, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan *Nur Intang, S.Ag.*, sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian dan alaisis putusan yang telah dilakukan, secar garis besar penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan dalam

pertimbangan hakim ketika memutuskan suatu perkara dispensasi nikah di bawah umur adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, Undang-Undang dan juga menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam.

Dalam penetapan putusan pada perkara nomor 73/Pdt.P/2016/PASgm prosedur sudah memenuhi syarat sehingga majelis memberikan dispensasi. Menurut majelis sudah dipertimbangkan berdasarkan fakta bahwa, yang menghalangi antara anak para pemohon itu hanyalah masalah administrasi yaitu berkenaan dengan umur sedangkan yang lain tidak ada halangan dan tidak ada larangannya untuk menikah. Sehingga majelis hakim berpendapat permohonan para pemohon beralasan dan terbukti sehingga dapat dikabulkan karena umur dari anak pemohon sudah 18 (delapan belas) tahun kurang beberapa bulan untuk cukup 19 (sembilan belas) tahun dan tidak ada larangan atau paksaan dari pihak manapun. Pertimbangan yang lain adalah kalau pernikahan itu ditunda jangan sampai berakibat negative, jadi mencegah sesuatu yang bersifat negative lebih didahulukan dari pada memperoleh sesuatu yang bersifat positif. Jadi ada peluang bagi mereka ketika sudah saling kenal untuk melakukan hal-hal yang bersifat negative dari pada menunggu mereka sampai cukup umur. Berdasarkan UU Pernikahan untuk menghindari hal-hal yang bersifat negative maka sebaiknya dinikahkan, itu salah satu alasan dalam memberikan dispensasi nikah karena untuk mencegah sesuatu yang bersifat negative.

Seseorang yang tidak diberikan dispensasi justru akan menimbulkan hal-hal yang negative dibandingkan dengan diberikan dispensasi, maka dari itu dari pertimbangan majelis maka pada perkara nomor 73/Pdt.P/PA Sgm diberikan

dispensasi karena tidak ada halangan lain selain dengan umur dari anak pemohon yang belum cukup umur.

Perkara dispensasi itu adalah perkara ringan karena yang mengajukan cuma 1 (satu) pihak artinya pihak pengadilan dalam hal ini majelis, cuma memeriksa apakah yang bersangkutan sudah mampu untuk menikah atau tidak. Karena yang namanya pernikahan sudah memunculkan hak dan kewajiban apakah yang bersangkutan ini sudah mampu melaksanakan kewajibannya pasca menikah, kalau sudah diperkirakan tidak ada lagi yang menghalangi atau suatu yang mengakibatkan mereka tidak mampu menyalurkan pernikahan kecuali umur termasuk maka majelis mengabulkan.

Perkara dispensasi ini adalah perkara ringan dimana hanya permohonan agar diijinkan menikah, maka tidak ada proses mediasi. Adapun yang kemungkinan terjadi apabila sudah ada putusan dari Pengadilan bahwa yang bersangkutan sudah ijin menikah, dikemudian hari saudara yang bersangkutan tidak ingin lagi melanjutkan ke jalan pernikahan itu terserah dari yang bersangkutan. Karena dengan adanya putusan dispensasi dari Pengadilan tidak mengharuskan seseorang untuk menikah tapi dispensasi itu adalah mengizinkan seseorang yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang perkawinan untuk menikah, kecuali yang bersangkutan ingin melanjutkan ke pernikahan maka harus menikah dengan wanita yang disebutkan dalam putusan mejelis. Akan tetapi kalau yang bersangkutan akan menikah dengan orang lain maka dia harus mengajukan kembali permohonan dispensasi dan keputusan dispensasi yang sebelumnya dianggap batal demi hukum.

Setelah pengadilan telah memberikan salinan putusan dispensasi sudah tidak ada tindak lanjut dari Pengadilan. Adapun yang akan menindaklanjuti adalah yang bersangkutan kepada pihak KUA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun faktor-faktoryang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah ada 2 (dua) yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Faktor Internal berarti yang terdapat pada diri pribadi si anak yang bersangkutan. Dikatakan si anak karena yang mengajukan adalah rata-rata orang tua dari si anak, misalnya ada komitmen bahwa yang bersangkutan ini harus segera menikah artinya tidak dilihat bahwa yang bersangkutan hamil atau tidak, ada juga faktor yang menyebabkan misalnya sudah terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi sebelum menikah, walaupun itu tidak hamil, apalagi hamil.

Faktor Eksternal, yaitu bersumber dari orang tua, orang sekitar atau lingkungan. Yang di maksud seperti ini, jika saja yang menyuruh menikah itu orang tua dari pihak laki-laki karena melihat anaknya sering membawa perempuan dan sudah mampu menikah, atau dari pihak orang tua perempuan, melihat anaknya sering dibawa atau pergi bersama laki-laki.

2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa terkait penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur pada penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah :

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka berdua sudah sangat ingin

membina rumah tangga oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan keinginan para Pemohon semata atau tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh para Pemohon terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) menunjukkan kesiapan keduanya, baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga menunjukkan urgensi pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang bila ditunda justru berpotensi mengganggu hubungan silaturahmi antara dua keluarga bahkan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti).

#### **B. Saran**

1. Bagi masyarakat agar mengetahui bahwa dalam suatu pernikahan ada aturan yang mengatur sehingga masyarakat tidak serta merta menikah di bawah umur melainkan masyarakat harus mengajukan permohonan dispensasi nikah dibawah umur pada Pengadilan Agama.
2. Bagi orang tua hendaknya memberikan pendidikan yang baik sejak dini bagi anaknya, memberikan pemahaman agama sebagai pedoman hidup dan memberi perhatian lebih terhadap segala perilaku putra/putrinya sehari-hari baik di dalam maupun di luar rumah agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang syari'at.
3. Harus adanya sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang lebih dari pemerintah dan para tokoh masyarakat baik ulama, dosen dan guru yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur misalnya seminar, pengajian dll.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azzam Muhammad Aziz Abdul & Hawwas Sayyed Wahhab Abdul., *FIQH MUNAKAHAD (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, AMZAH, Jakarta November 2009.
- Banjariy, Muhammad Arsyad al-, *Kitab al-Nikah*, Yayasan Pendidikan Dalam Pagar, Martapura, 2002.
- Departemen Agama R.I, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2010.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Maloko M. Thahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassar : Alauddin University Pres Makassar, 2012.
- Marwan M., & Jimmy., *Kamus HUKUM Dictionary Of Law Complate Edition*, Reality Publisher, 2009.
- Muhammad Abdulkadir., *Hukum Perdata Indonesia*, PT CITRA ADITYA BAKTI Bandung, 2014.
- Samin Sabri., & Aroeng Narmaya Andi., *FIKIH II* , Alauddin Press, Makassar, 2010.
- Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Sodik Abror., *Fikih Keluarga Muslim*, Aswaja Pressindo Yogyakarta, 2015.
- Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, 2010.
- Syahuri Taufiqurrohman., *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, KENCANA PRENADA MEDIA GRUP Jakarta, 2013.



Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, , Jakarta 2003.

Syarifuddin Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group Jakarta, 2014.

Tim Permata Pres, *Undang-Undang Perkawinan dan Administrasi Kependudukan, kewarganegaraan*, Permata Pres, 2015.

Ubaedillah A., & Rozak Abdul., *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Kencana & ICCE uin Jakarta, 2012.

#### **B. Website:**

Abbas Hakam., 2014, *Artiel Batas Umur Perkawinan Dalam Hukum Islam* ([www.hakamabbas.blogspot.co.id](http://www.hakamabbas.blogspot.co.id)) di akses 10 juni 2016, 05:35 WITA.

Alga Kartiman., 2012, *Artiel Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang* ([www.kua-rancah.blogspot.co.id](http://www.kua-rancah.blogspot.co.id)) di akses 10 juni 2016, 15:59 WITA.

Lubis Petti., Astuti Puji Dwi Lutfi., 2010, *Artikel Efek Buruk Pernikahan di Bawah Umur* ([www.life.viva.co.id](http://www.life.viva.co.id)) di akses 10 juni 2016, 00:20 WITA.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Wawancara dengan bapak Dr. Muhammad Najmi Fajri S.Hi., M.Hi Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa



Bersama Bapak Sekertaris Pengadilan Agama Sungguminasa



Bersama Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa

**PENETAPAN**  
**Nomor 73/Pdt. P/2016/PA Sgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 49 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2 (S.2), pekerjaan Swasta (Konsultan Bisnis), bertempat tinggal di Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **Pemohon II**, umur 50 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III (D.III), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, bertempat tinggal di Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm, tanggal 27 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Muh. Nur Fajri umur 18 tahun (lahir tanggal 28 Oktober 1997) sebagaimana yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. 446/UM/CS/1997, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di

Kompleks BTN Tamarunang Indah, Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa;

2. Bahwa kedua orang tua dari Muh. Nur Fajri masih hidup yaitu Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Nur Fajri *bin* Much Zuhri tersebut sudah lama berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Isti Yuni Damayanti *binti* Drs. H. Muhammad Idris berumur 17 tahun (lahir tanggal 4 Juni 1998), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kompleks Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran intim) dengan perempuan tersebut dan tidak mungkin lagi dipisahkan;
5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama oleh para Pemohon seperti terjadinya kehamilan di luar nikah, maka para Pemohon sebagai orang tua bermaksud untuk menikahkan Muhammad Nur Fajri dengan Isti Yuni Damayanti tersebut namun oleh karena Muhammad Nur Fajri belum cukup umur untuk menikah yaitu belum genap berumur 19 tahun oleh karena itu maka para Pemohon memohon untuk diberikan izin atau dispensasi nikah kepada Muh. Nur Fajri untuk bisa dinikahkan dengan perempuan yang bernama Isti Yuni Damayanti;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan tersebut tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
7. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II tersebut masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua laki-laki tersebut telah sama-sama setuju atas rencana pernikahan Muh. Nur Fajri dengan Isti Yuni Damayanti;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Propinsi



Sulawesi Barat untuk menikahkan anak pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi PPN/KUA setempat belum dapat menikahkan mereka sebelum ada penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa terkait dengan Dispensasi Nikah;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Penetapan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan izin (dispensasi) nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh. Nur Fajri untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang Isti Yuni Damayanti;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar para Pemohon mempertimbangkan kembali niatnya dan tidak menikahkan anak kandungnya karena masih berumur 18 tahun (berusia di bawah 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa anak kandung para Pemohon bernama Muh. Nur Fajri, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan apa yang didalilkan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), NIK : 7306081401670003, tanggal 03-05-2013, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) NIK : 7306084404660006, tanggal 03-05-2013, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarejo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Nomor 494/33/III/1994, tanggal 27-03-1994, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nur Fajri, Nomor 446/UM/CS/1997, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Nur Nuhung bin Nuhung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena berteman dengan Pemohon I.
  - Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri karena anak tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun.
  - Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni Damayanti.
  - Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan Isti Yuni Damayanti adalah sepasang kekasih dan telah lama menjalin hubungan asmara.



- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) sangat susah untuk dipisahkan.
  - Bahwa para Pemohon telah datang melamar ke orang tua calon istri anak para Pemohon, namun tanggal perkawinan belum ditetapkan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa.
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab.
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.
2. Dg Rola bin Dg Nai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon I.
  - Bahwa yang saksi ketahui para Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri karena anak tersebut masih di bawah umur yaitu 18 tahun.
  - Bahwa yang saksi ketahui calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni Damayanti.
  - Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan Isti Yuni Damayanti adalah sepasang kekasih dan telah lama menjalin hubungan asmara.
  - Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) sangat susah untuk dipisahkan.
  - Bahwa para Pemohon telah datang melamar ke orang tua calon istri anak para Pemohon, namun tanggal perkawinan belum ditetapkan karena menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa.
  - Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya menurut saksi telah siap membina rumah tangga dan mampu bertanggung jawab.

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan para Pemohon termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Muh. Nur Fajri yang masih berumur 18 tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon bernama Muh. Nur Fajri telah hadir di persidangan dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mempertegas dan membenarkan semua dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gowa yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidarejo, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Nomor 494/33/III/1994, tanggal 27-03-1994, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan Muhammad Nur Fajri adalah anak kandung para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon (Muhammad Nur Fajri), telah terbukti bahwa anak para Pemohon umurnya masih di bawah umur 19 tahun yaitu 18 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Nur Nuhung bin Nuhung dan Dg Rola bin Dg Nai, kedua saksi para Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., jo. Pasal 1911 KUHPerdara, oleh sebab itu saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Muh. Nur Fajri akan tetapi anaknya tersebut masih berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Isti Yuni Damayanti.

- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti telah menjalin hubungan (berpacaran intim) dan sangat sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan.
- Bahwa anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) telah siap menjadi suami/kepala rumah tangga, demikian pula calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) juga telah siap pula menjadi istri/ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut baik bukti P.1, P.2, dan P.3, maupun keterangan saksi-saksi (Nur Nuhung bin Nuhung dan Dg Rola bin Dg Nai), Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) mendesak untuk dilaksanakan karena anak para Pemohon dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti hubungannya sudah sangat dekat (berpacaran intim) sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) tidak terikat dalam hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan.
- Bahwa baik anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) maupun calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) sama-sama telah siap membina rumah tangga dan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti sudah terjalin sedemikian erat dan bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan mereka berdua melakukan perbuatan yang dilarang oleh

syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku, sementara mereka berdua sudah sangat ingin membina rumah tangga oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan keinginan para Pemohon semata atau tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh para Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu antara anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti binti Drs H. Muhammad Idris) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat ( 1 ) huruf ( c ) dan ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk pada menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (Muh. Nur Fajri) didorong karena adanya fakta (feitelijke grounden) bahwa anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan perempuan bernama Isti Yuni Damayanti dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam dan perundang-undangan, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dengan calon istrinya (Isti Yuni Damayanti) menunjukkan kesiapan keduanya, baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga menunjukkan urgensi pernikahan tersebut untuk segera dilaksanakan, yang bila ditunda justru berpotensi mengganggu hubungan silaturahmi antara dua keluarga bahkan dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) dan calon istrinya (Isti Yuni

Damayanti), terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila permohonan para Pemohon dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Isti Yuni Damayanti binti Drs H. Muhammad Idris.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Muh. Nur Fajri) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (Isti Yuni Damayanti).
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Selasa**, tanggal **31 Mei 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **24 Syakban 1437 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, Ketua

Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nur Intang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Jamil, S.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

**Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Nur Intang, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	340.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp 431.000,00**  
**(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**



## SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Hal :Permohonan Judul Skripsi.

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi

Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa.

AssalamuAlaikumWr.Wb

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUSYAHWIR TAHIR  
Nim : 10500113133  
Semester/Klpk : VI (Enam) /C  
Angkatan : 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

Acc  
[Signature]

- ① Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa) ✓
2. Tinjauan Yuridis UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Sisa Uang Konsumen di SPBU (Studi Kasus Bulukumba)
3. Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Jaminan Konsumen Dibidang Jasa Angkutan (Studi Kasus Jasa Angkutan Bulukumba)

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. *WassalamuAlaikumWr. Wb.*

Samata, 9 Juni 2016

Mengetahui,

Penasehat Akademik

[Signature]

(Sitti Nurjannah, SH., MH.)

NIP. 19760822 200312 2 003

Pemohon,

[Signature]

(MUSYAHWIR TAHIR)

NIM. 100500113133


9/6/16

[Signature]

**RAHMAN SYAMSUDDIN**  
NIP 19821207 200901 1 010



# PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI / MASALAH	HARI/TANGGAL	MENYETUJUI SEKERTARIS JURUSAN
<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah untuk anak dibawah umur di Pengadilan Agama Sungguminasa ?</li> <li>2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa terkait penetapan dispensasi pernikahan di bawah umur ?</li> </ol> <p><b>JUDUL SKRIPSI</b></p> <p>Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa)</p>	<p>9/6/16</p>	<p></p> <p><b>RAHMAN SYAMSUDDIN</b> NIP 19821207 200901 1 010</p>
<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang uang kembaliannya tidak sesuai berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 ?</li> <li>2. Sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku usaha SPBU yang melanggar ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 terkait pengembalian uang konsumen ?</li> </ol>		

<p><b>JUDUL SKRIPSI</b></p> <p>Tinjauan Yuridis UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Sisa Uang Konsumen di SPBU (Studi Kasus Bulukumba)</p>		
<p><b>RUMUSAN MASALAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jasa bidang angkutan berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 ?</li> <li>2. Apa sanksi perdata terhadap pelaku usaha jasa bidang angkutan yang melanggar UU No. 8 Tahun 1999 ?</li> </ol> <p><b>JUDUL SKRIPSI</b></p> <p>Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 dalam Memberikan Jaminan Konsumen Dibidang Jasa Angkutan (Studi Kasus Jasa Angkutan Bulukumba)</p>		
<p><b>PEMBIMBING</b></p>	<p><b>HARI/TANGGAL</b></p>	<p><b>MENYETUJUI</b></p> <p><b>KETUA</b></p> <p><b>JURUSAN</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> </ol>		





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
**Nomor : 306 Tahun 2016**  
**TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI**  
**TAHUN 2016**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang :**
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing;
  - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
  4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
  5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- a. Menunjuk saudara : 1. Dr. M.Thahir Maloko, M.Hi  
: 2. St. Nurjannah, SH.,MH

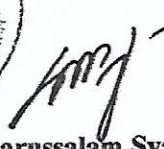
Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : Musyahwir Tahir  
N I M : 10500113133  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA.Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa"

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
pada tanggal : 27 Juni 2016

  
**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag**  
NIP. 19621016 199003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923*  
*Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836*

Nomor : SI.3A/PP.00.9/ 1701/2016  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi  
An. Musyahwir Tahir/ 10500113133

Kepada Yth;

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. <b>Dr. M. Thahir Maloko, M.H</b> | Sebagai Pembimbing I.  |
| 2. <b>St. Nurjannah, SH., MH</b>    | Sebagai Pembimbing II. |

Di-

Samata

bertindak selaku **Pembimbing** pada **Seminar Draft Skripsi**, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 01 Juli 2016  
Waktu : 13.00 WITA - selesai  
Tempat/Ruangan : Jurusan Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA.Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)"**

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Samata, 28 Juni 2016



Wassalam  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

**Isiqamah, SH., MH.**

NIP. 19680120 199503 2 001

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir



**LEMBAR PENGESAHAN  
DRAFT SKRIPSI**

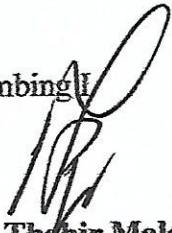
**TINJAUAN HUKUM DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR**  
*(Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA.Sgm Di Pengadilan Agama  
Sungguminasa Kabupaten Gowa)*

Disusun dan diajukan Oleh :  
**MUSYAHWIR TAHIR**  
**NIM: 10500113133**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan  
penulisan skripsi  
Pada tanggal : November 2016

**DOSEN PEMBIMBING**


Pembimbing I

  
**Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi**  
**NIP. 19631231 199503 1 006**


Pembimbing II

  
**St. Nurjannah, S.H., M.H**  
**NIP. 19760822 200312 2 003**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

  
**Istiqamah, SH. MH**  
**NIP. 196801120 199503 2 001**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
*Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

  
**Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M.Ag**  
**NIP.19621016 199003 1 003**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis skripsi saudara **Musyahwir Tahir, Nim.10500113133**, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, ***"Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)"***. memandang bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke seminar hasil.

Demikian Persetujuan ini dibeikan untuk diperoses selanjutnya.

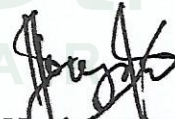
Pembimbing I



**Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi**  
NIP. 19631231 1995 1 006

Gowa, 8 Februari 2017

Pembimbing II



**St. Nurjannah, SH., MH**  
NIP. 19760822 200312 2 003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)*  
*Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836*

Nomor : SL.1/PP.00.9/737/2016  
Lamp : 1 (satu) exemplar  
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 22 Desember 2016

Kepada  
Yth. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan  
Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel

Di-  
Makassar

*Assalamu 'AlaikumWr.Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Musyahwir Tahir
N I M	: 10500113133
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Semester	: VII (tujuh)
Alamat	: BTN Hertasning Madani Jl.Bonto Tangnga

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

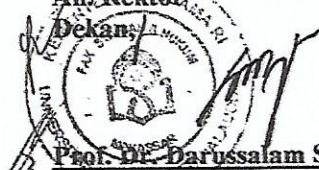
***"Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.P/2016/PA Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa)"***

Dengan dosen pembimbing:

1. **Dr. M.Thahir Maloko., M.HI**
2. **St. Nurjannah., SH., M.H**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 s/d 2 Februari 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.  
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.

Wassalam  
An. Rektor  
Dekan  
  
**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag**  
NIP. 19621016 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
( UPT - P2T )

Nomor : 15798/S.01P/P2T/12/2016  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Gowa

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : SI.1/PP.00.9/737/2016 tanggal 22 Desember 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUSYAHWIR TAHIR**  
Nomor Pokok : 10500113133  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR (ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 73/PDT.P/2016/PA SGM DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Desember 2016 s/d 02 Februari 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 23 Desember 2016

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peninggal.







**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 27 Desember 2016

K e p a d a

Nomor : 070/2173 /BKB.P/2016

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Gowa

D i -

T e m p a t

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 15798/S.01.P/P2T/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Musyahwir Tahir**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 29 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Perum. Herstasning Madani Blok. K. No. 24

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat saudara yang berjudul : **"TINJAUAN HUKUM DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR (ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 73/PDT.P/2016/PA SGM DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA)"**.

Selama : 28 Desember 2016 s/d 2 Februari 2017  
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA  
KEPALA BADAN,



**KAMALUDDIN SERANG, S.Sos. MM**

Pangkat / Pembina Utama Muda

No. 19590205 198003 1 013

**Tembusan :**

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ag dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**  
**JL. MASJID RAYA NO. TELP. (0411) 864298 FAX (0411) 864299**  
**SUNGGUMINASA 92111**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W20-A18/ 193 /BP.02/I/2017

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, menerangkan bahwa :

Nama : Musyahwir Tahir  
Tempat /Tanggal Lahir : Bulukumba, 29 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Perum.Hertasning Madani Blok.K.No.24

Telah mengadakan penelitian sebagai salah satu penyelesaian penelitian Individual dengan judul :

*“ Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur ( Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.g/2016/PA.Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa) ”*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 30 Januari 2017  
Ketua,  
  
**Drs. Ahmad Nur, M.H**  
Nip. 19700803 199703 1 002



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
Nomor : 00 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :  
Nama : Musyahwir Tahir  
N I M : 10500113133  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2017  
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
Judul : "Tinjauan Hukum Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara No. 73 /Pdt.P /2016/ PA.Sgm di Pengadilan Agama Sunggu Minasa Kab. Gowa)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;  
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 c Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Sekretaris : Istiqamah, S.H, M.H  
Penguji I : Dr. Hamsir, S.H, M.H  
Penguji II : Rahman Syamsuddin, S.H, M.H  
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi  
**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 14 Februari 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923*  
*Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : 791.../SL.I/PP.00.9/0.2-1/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **UNDANGAN SEMINAR HASIL**

Samata, 14 Februari 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua )
  2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
  3. Dr. Hamsir, S.H, M.H ( Penguji I )
  4. Rahman Syamsuddin, S.H,M.H ( Penguji II )
  5. Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi (Pembimbing I)
  6. St. Nurjannah, S.H, M.H (Pembimbing II)
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Musyahwir Tahir  
NIM : 10500113133  
Jurusan : Ilmu Hukum

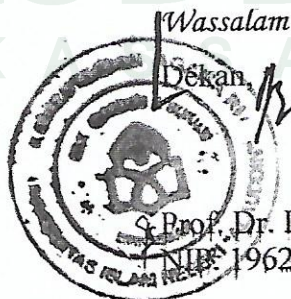
Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2017

Waktu : Pukul 09.00 – 10.00

Tempat : Ruang Leb Yustisi

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIDN 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 917 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)  
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 17 Juli 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;  
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.  
8. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kedua** : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Ketiga** : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Keempat** : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;  
**Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Samata  
Pada tanggal : 17 Juli 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan

- Yth. 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;  
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 917 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

NO	NAMA/NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KETUA/SEKANG.
		MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDUDIS	MKKP	
01	02	03	04	05	06
1	Musyawwir Tahir 10500113133	Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	Dr. Achmad Musyahid, M.Ag	Isiqamah, S.H, M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, S.E Nurhayati Wahid
2	Muh. Arham Latif 10500113176	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag	Dr. Darsul S Puyu, M.Ag	Ahkam jayadi, S.H., M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, S.E Nurhayati Wahid
3	Miftahul Mutatahhirin 10500113133	Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A	Dr. Duding Abdullah, M.Ag	Rahman Syamsuddin, SH., M.H	Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, S.E Nurhayati Wahid

Sanata, 17 Juli 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

**DAFTAR NILAI**  
**UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

Dosen Penguji : Istiqamah S.H, M.H

Mata Ujian : 1. MKDU / Dirasah Islamiyah  
2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih  
3. MKPP / Ilmu Hukum

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
	10500113133	Musyahwir Tahir	Ilmu hukum		A	(4)	✓

Samata, 18 Juli 2017

Penguji,

Istiqamah S.H, M.H

NIP: 196801201995032007






**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

**DAFTAR NILAI**  
**UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

Dosen Penguji : Dr. Achmad Musyahid, M.Ag

Mata Ujian : 1. MKDU / Dirasah Islamiyah  
2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih  
3. MKPP / Ilmu Hukum

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
	10500113133	Musyahid Tahir	Ilmu Hukum			38	

Samata, 21 - Juli 2017

Penguji,



Dr. Achmad Musyahid, M. Ag

NIP :





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

**DAFTAR NILAI**  
**UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**

Dosen Penguji : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag

Mata Ujian : 1. MKDU / Dirasah Islamiyah  
2. MKDK / Fikih / Ushul Fikih  
3. MKPP / Ilmu Hukum

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JURUSAN	TANDA TANGAN	NILAI		KET
					HURUF	ANGKA	
	10500113133	Muhyahwir Tahir	Ilmu Hukum		A	4	

Samata, 19-7-2017

Penguji,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.A.  
NIP : 19621016 199003 1 003

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

**DAFTAR NILAI**  
**UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**  
SEMESTER ..... 8 ..... (.....) WISUDA PERIODE ..... SEPTEMBER .....  
**TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**Nama** : **MUSYAHWIR TAHIR**

**NIM** : **10500113133**

**Jurusan** : **ILMU HUKUM**

**Judul Skripsi** : **TINJAUAN HUKUM DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR (ANALISIS PENETAPAN PERKARA NO.73/Pdt.9/PA. SSM di PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KAB. GOWA).**

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
3.8	4	4	11.8	3.93

Samata, 24 JULI 2017

Kasubag.  
Akademik dan Kemahasiswaan  
  
**MUSYAHWIR, S.E**  
NIP : 19670309 199303 2 002



## PERSETUJUAN PENGUJI

Penguji penulisan skripsi saudara, **MUSYAHWIR TAHIR**, NIM: **10500113133**, Mahasiswa Jurusan ILMU HUKUM pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM DISPENSASI NIKAH ANAK DIBAWAH UMUR ( Analisis Penetapan Perkara Nomor 73/Pdt.g/PA.Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa )**”.

Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah/Skripsi.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 20 Juli 2017

Penguji I

  
**Dr. Hamsir, S.H, M.Hum**  
NIP: 19610404 199303 1 005

Penguji II

  
**Rahman Syamsuddin, M.Ag**  
NIP: 19821207 200901 1 010

Pembimbing I

  
**Dr. M. Tahir Maloko, M.H**  
NIP: 19631231 199503 1 006

Pembimbing II

  
**St. Nuzannah, S.H., M.H.**  
NIP: 19760822 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I - Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp. 0411 864923-864920 Fax. 864923  
 Kampus II - Jl. P.H. Widyadarmas No. 36 Sanataungguminusa - (Gowa) Tlp. 841870 Fax 8221411*

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**  
 Nomor : 1005 Tahun 2017  
**TENTANG**  
**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI**  
**TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

**Membaca** : Surat Permohonan :  
 Nama : Musyahwir Tahir  
 N I M : 10500113133  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2017  
 Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi  
 Judul : "Tinjauan Hukum Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur  
 (Analisis Penetapan Perkara No. 73/Pdt.g/PA.Sgm)"

**Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;  
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;  
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;  
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Tialli, M.Ag  
 Penguji I : Dr. Hamsir, M.Hum  
 Penguji II : Rahman Syamsuddin S.H, M.H  
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE  
 2. Nurhayati Wahid

**Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;  
**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



: Samata  
 : 26 Juli 2017

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
 NIP. 196210'6 199003 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax 864923*  
*Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400*

Nomor : 2504/SL.1/PP.00.9/07/2017  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **UNDANGAN MUNAQASYAH**

Samata, 26 Juli 2017

*Kepada*

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
  2. Dr. H. Abd. Halim Talhi, M.Ag (Sekertaris)
  3. Dr. Hamsir, M.Hum (Penguji I)
  4. Rahman Syamsuddin, S.H, M.H. (Penguji II)
  5. Dr. M. Thahir Maloko, M.H.I. (Pembimbing I)
  6. St. Nurjannah, S.H, M.H. (Pembimbing II)
  7. Pelaksana

Di  
Makassar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Musyahwir Tahir

N I M : 10500113133

Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 31 Juli 2017

Buka Sidang : 08.30 WITA

Waktu : Pukul 09.00 – 10.00 WITA

Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Musyahwir Tahir  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir: Bulukumba, 29 Mei 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Perumahan Hertasning Madani Blok K No. 24  
sNomor Telepon : 082346825999  
E-mail : ahwir\_why95@yahoo.co.id

### DATA ORANG TUA

Ayah : H. Muh. Tahir S.Sos  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Ibu : Hj. Raja Kebo  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2000-2001 : Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Mesjid Agung Bulukumba  
2001-2007 : SD Negeri 24 Salemba Bulukumba  
2007-2010 : MTS Pondok Pesantren Babul Khaer Bulukumba  
2010-2013 : SMA Negeri 1 Bulukumba

Gowa, 7 Juli 2017

MUSYAHWIR TAHIR